

## PERSEPSI GENERASI MUSLIM Z TERHADAP POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Muhamad Idris Purwanto<sup>1</sup>, Kalis Purwanto<sup>2</sup>, Achmad Fauzan<sup>2</sup> dan Irton<sup>4</sup>

Universitas Amikom Yogyakarta

Email : [masidris@amikom.ac.id](mailto:masidris@amikom.ac.id)<sup>1</sup>, [kalis@amikom.ac.id](mailto:kalis@amikom.ac.id)<sup>2</sup>, [fauzanasmara@amikom.ac.id](mailto:fauzanasmara@amikom.ac.id)<sup>3</sup>,  
[irtonusman@amikom.ac.id](mailto:irtonusman@amikom.ac.id)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Persepsi Generasi Muslim Z terhadap politik uang pada Pemilu 2019 dan harapannya pada Pemilu 2024 yang akan datang. Tidak dipungkiri bahwa umat Islam masih menjadi mayoritas di Indonesia dan menjadi ceruk pemilih dalam setiap event politik. Generasi Muslim Z banyak menjadi sasaran bagi para politisi untuk mendulang suara. Generasi ini merupakan para pemilih pemula yang pendidikan politiknya masih rendah dan rentan dengan kampanye hitam termasuk politik uang. Generasi muslim Z sebagian sudah menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2019 silam. Data Pemilu 2019 ada sebanyak 5.035.887 pemilih pemula yang mempunyai hak pilih. Sebagian besar pada saat Pemilu 2019 mereka masih bersekolah dan pertama kali mengikuti event politik nasional. Sistem politik dalam Pemilu menggunakan metode *one man one vote* secara langsung untuk memilih anggota legislatif tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan pusat. Metode ini memiliki banyak faktor pengaruh keterpilihan, salah satunya politik uang. Politik uang pada Pemilu 2019 mejadi salah satu fenomena yang terjadi. Menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pada Generasi muslim Z menyikapi Pemilu 2019 silam dan harapan Pemilu 2024 yang akan datang terkait politik uang yang terjadi pada saat itu. Hal ini berguna untuk mengukur pemahaman Generasi Muslim Z terhadap politik dan tanggapan mereka tentang praktik politik uang).

Kata Kunci: *Generasi Muslim Z, Pemilu 2019-2024, Politik uang*

### ABSTRACT

*This article discusses Generation Z's perceptions of money politics in the 2019 elections and their hopes for the upcoming 2024 elections. It is undeniable that Muslims still make up the majority in Indonesia and are a niche voter in every political event. Generation Z has become a target for many politicians to gain votes. This generation is first-time voters whose political education is still low and vulnerable to black campaigns, including money politics. Some of the Z Muslim generation have become first-time voters in the 2019 general election. Election data for 2019 there are 5,035,887 first time voters who have the right to vote. Most of them at the time of the 2019 election were still in school and taking part in a national political event for the first time. The political system in elections uses the one-man-one-vote method directly to elect legislators at the district, provincial and central city levels. This method has many factors influencing election, one*

*of which is money politics. Money politics in the 2019 election is one of the phenomena that occurs. It is important to know how far the Muslim Generation Z has reacted to the past 2019 Election and expectations for the upcoming 2024 Election regarding the money politics that took place at that time. This is useful for measuring Generation Z's understanding of politics and their responses to the practice of money politics.*

*Keywords: Muslim Generation Z, 2019-2024 Election, money politics*

## **PENDAHULUAN**

Menurut WHO Generasi Z saat ini merupakan para remaja yang berumur 10-19 tahun, sedangkan menurut Kemenkes RI berusia 10-18 tahun, dan menurut BKKBN menyebut remaja berumur 10-24 tahun (Kemenkes RI, 2014). Generasi Z dibesarkan pada masa pesatnya teknologi informasi dan akrab dengan media sosial, sebagai identitas mereka (Singh & Dangmei, 2016). Sehingga generasi ini berbeda dari generasi-generasi sebelumnya dalam menyikapi sebuah fakta, termasuk di dalamnya proses politik.

Generasi Muslim Z menjadi incaran suara pada pemilu 2019 silam, termasuk juga pada Pemilu 2024 yang akan datang. Data pemilih tetap pada Pemilu 2019 menurut data KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebanyak 192,83 juta jiwa, dan 5.035.887 orang pemilih pemula. Salah satu tahapan Pemilu adalah kampanye dengan berbagai cara, salah satunya *politik uang*, untuk menarik simpati agar mendapatkan suara sesuai yang diharapkan (Andayani, 2018; Databoks, 2019).

Demokrasi lokal di Indonesia selalu dihadapkan dengan pembiayaan politik yang sangat tinggi/*high cost politic* (Darma, 2022). Salah satu komponen yang menjadikan biaya politik tinggi, yakni politik uang. Politik uang merupakan komponen biaya politik yang illegal. Dalam banyak studi komponen biaya politik illegal lebih banyak dari biaya legalnya.

Pada Pemilu Serentak 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan sebanyak 15.052 laporan pelanggaran pemilu, mulai dari baik pidana, administrasi, ataupun yang ketiga bukan termasuk pidana maupun administrasi. Selanjutnya Bawaslu mencatat ada 28 kasus pelanggaran Pemilu 2019 yang telah diputuskan dalam persidangan. Dari jumlah tersebut, pelanggaran berupa politik

uang paling banyak terjadi. Bahkan data dari Kajian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan bahwa 95 % pemilih memilih calon yang bagi-bagi duit (Bayu, 2019).

Dalam tulisan ini akan menganalisis fenomena politik uang pada Pemilu 2019 dan harapan pada Pemilu 2024 yang akan datang dalam pandangan kaum muda Muslim Generasi Z dan mendeskripsikan prespektif pemikiran dari kaum muda Muslim Generasi Z tentang praktik politik uang

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017). Data didapat dari hasil survei, observasi lapangan, wawancara lapangan mendalam dengan sejumlah informan (nara sumber) serta studi kepustakaan. Responden menjawab beberapa pertanyaan dalam kusioner yang dibagikan dan beberapa orang tidak lanjut dengan wawancara mendalam.

### **Generasi Z sebagai pemilih**

Generasi Z masuk dalam kategori pemilih pemula. Rentang usia pemilih pemula adalah rentang usia 17-21 tahun atau sudah menikah. Riswanda Imawan berpandangan bahwa karakteristik pemilih pemula sangat ketara terlihat berbeda dengan pemilih lama. Pemilih pemula cenderung lebih labil dan apatis, literasi politik yang kurang, cenderung mudah ikut dengan teman sejawat dan baru dalam tahap belajar politik dengan memberikan suara pada pelaksanaan pemilu.

Surbakti (1997) mendefinisikan perilaku memilih adalah suatu aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan sebuah keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) dalam suatu pemilihan umum secara langsung. Dalam tulisan ini Generasi Z yang diambil

sebagai sampling adalah mereka yang duduk di sekolah menengah dan bangku kuliah.

### **Politik Uang**

Menurut Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, politik uang atau *money politic* tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni “*setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).*

Menilik pasal yang tertera di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua yang terkait dalam peserta pemilu dikatakan melakukan pelanggaran pemilu jika melakukan, Pertama, dengan sengaja. Kedua, Menjanjikan uang/materi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, Dilakukan untuk mempengaruhi keputusan pemilih dalam menentukan pilihannya (Nail, 2019).

*Money Politic* dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai suap, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) suap berarti uang sogok. Politik uang merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain untuk mempengaruhi suara pemilih (Kumolo, 2015). Menurut Goodpaster (2001) politik uang (*money politic*) merupakan bagian dari perilaku korupsi yang terjadi saat penyelenggaraan pesta rakyat atau pemilihan umum. Terjadinya politik uang pada saat penyelenggaraan pemilihan umum mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Adapun bentuk politik uang dapat dikategorikan menjadi dua, yakni uang secara cash (*cash money*), dan bewujud fasilitas umum. Uang menjadi faktor yang sangat dominan

dalam mendongkrak seseorang yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum (Hamid, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian tentang persepsi generasi z terhadap politik uang pada Pemilu 2019 ini memfokuskan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Responden dari penelitian ini adalah generasi Z yang tinggal di DIY. Total responden sebanyak 197 yang mana semua responden masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. Berdasarkan pendidikan terakhir responden penelitian ini yakni 97,46% SMA/Sederajat yaitu 192 orang, S1 4 orang dan diploma 1 orang. Dari semua jumlah responden tersebut jenis kelamin laki-laki mendominasi dengan 148 orang atau 75,13% sedangkan perempuan sebanyak 49 atau 24,87%.

Persepsi merupakan penilaian oleh seseorang yang didapatkan dari pengetahuan serta pengalaman emosional setiap orang yang berbeda-beda dengan disertai munculnya peristiwa yang dialami, kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lain. Persepsi yang hendak digali meliputi empat komponen yakni *pengalaman, pemahaman, sikap, dan harapan*. Pengalaman disini merupakan untuk mengukur sedalam apa individu dalam mengalami peristiwa yang dialaminya. Pemahaman meliputi cara berfikir dalam menyimpan dan mengumpulkan informasi yang diperoleh. Sikap merupakan perasaan yang memberi pengaruh pada persepsi yang akan disampaikan oleh seseorang. Harapan diartikan sebagai evaluasi dalam penilaian terhadap sesuatu sebagai aspek yang positif dan negatif.

Peneliti membagikan angket kepada para responden di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tersebar dalam lima kabupaten dan kota yakni Bantul, Sleman Kota Yogyakarta, Gunungkidul dan Kulon Progo. Persebaran domisili responden di kabupaten dan kota, mayoritas bertempat tinggal di Kabupaten Sleman sebanyak 151 atau 76,65%, diikuti Kota Yogyakarta 21 responden 10,66%, Bantul 18 responden 9,14%, Gunung Kidul 3 responden 1,52%, Kulonprogo 2

responden 1,02%, Pekan Baru 1 responden 0,51% dan Tannggerang 1 responden 0,51%.

### **Pengalaman Generasi Z Tentang Politik Uang**

Pengalaman merupakan suatu peristiwa yang dialami oleh individu dalam hidupnya, untuk mengukur sedalam apa individu dalam memahami pengalaman terhadap peristiwa yang dialaminya. Pengalaman responden tentang politik uang di wilayah DIY disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1 Pengalaman responden dalam melihat pemberian uang tunai kepada masyarakat

Pernahkah Anda melihat ada tim sukses yang memberikan uang tunai kepada masyarakat?		
Pernah	66	33,50%
Tidak Pernah	131	66,50%

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak pernah melihat (66,5%) ada tim yang memberikan uang tunai kepada masyarakat di wilayah DIY.

Tabel 2 Pengalaman responden dalam melihat pembagian kaos, kain atau sarung

Pernahkah Anda melihat ada tim sukses yang membagi-bagikan kaos, kain, sarung kepada masyarakat di wilayah DIY		
Pernah	120	60,91%
Tidak Pernah	77	39,09%

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden pernah melihat (60,91%) ada tim sukses yang membagi-bagikan kaos, kain, sarung kepada masyarakat di wilayah DIY.

Tabel 3 Pengalaman responden dalam melihat pemberian sembako

Pernahkah Anda melihat ada tim sukses yang memberikan sembako kepada masyarakat di wilayah DIY		
Pernah	86	43,65%
Tidak Pernah	111	56,35%

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang pernah melihat (43,65%) ada tim sukses yang memberikan sembako kepada masyarakat di wilayah DIY.

Tabel 4 Pengalaman responden dalam melihat pemberian bantuan pembangunan fasilitas umum (jalan, masjid dll)

Pernahkah Anda melihat ada tim sukses yang memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum (jalan, masjid, dll) di wilayah DIY		
Pernah	76	38,58%
Tidak Pernah	121	61,42%

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang pernah melihat (38,58%) ada tim sukses yang memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum (jalan, masjid, dll) di wilayah DIY. Dari 4 item pertanyaan yang ditanyakan pada responden terkait pengalaman tentang Politik Uang, presentase tertinggi yakni responden pernah melihat (60,91%) ada tim sukses yang membagi-bagikan kaos, kain, sarung kepada masyarakat di wilayah DIY.

### **Pemahaman Generasi Z Tentang Politik Uang**

Pemahaman merupakan cara berfikir individu dalam menyimpan dan mengumpulkan informasi yang diperoleh. Dalam penggalan data tentang pemahaman responden yakni Generasi Z tentang politik uang di wilayah DIY terdiri dari 6 item pertanyaan. Yakni meliputi pemahaman tentang istilah politik uang, politik uang dalam Pemilu, pemahaman tentang praktik politik uang, kepercayaan

terhadap politik uang, melihat praktik politik uang, dan mendengar adanya praktik politik uang. Hasil dari responden disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Pemahaman responden tentang politik uang dalam pemilu

Apakah Anda paham tentang istilah politik uang dalam pemilu?		
Paham	110	55,84%
Kurang Paham	80	40,61%
Tidak Paham	7	3,55%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang paham tentang istilah politik uang dalam pemilu sebesar 55,84% dan masih terdapat 3,55% yang tidak paham.

Tabel 6 Pemahaman responden tentang politik uang pada Pemilu

Apakah Anda paham tentang istilah politik uang dalam pemilu?		
Paham	98	49,75%
Kurang Paham	89	45,18%
Tidak Paham	10	5,08%

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa responden yang paham tentang politik uang dalam Pemilu sebesar 49,75% dan masih terdapat 5,08% yang tidak paham.

Tabel 7 Pemahaman responden tentang praktek politik uang pada Pemilu

Apakah Anda paham tentang praktik politik uang dalam pemilu?		
Paham	77	39,09%
Kurang Paham	98	49,75%
Tidak Paham	22	11,17%

Berdasarkan tabel di 7 menunjukkan bahwa responden masih ada yang tidak paham tentang praktik politik uang dalam Pemilu sebesar 11,17%.

Tabel 8 Kepercayaan responden tentang terjadinya praktek politik uang pada Pemilu

Apakah Anda percaya jika dalam pemilihan Pemilu terjadi praktik politik uang?		
Percaya	147	74,62%
Kurang Percaya	42	21,32%
Tidak Percaya	8	4,06%

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa 74,62% responden percaya jika dalam Pemilu terjadi praktik politik uang.

Tabel 9 Responden melihat terjadinya praktek politik uang pada Pemilu

Apakah Anda pernah melihat praktek politik uang pada Pemilu ?		
Melihat	41	20,81%
Kurang Melihat	80	40,61%
Tidak Melihat	76	38,58%

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa sebanyak 20,81% responden pernah melihat praktik politik uang pada pilpres 2019 kemarin.

Tabel 10 Responden mendengar terjadinya praktek politik uang pada Pemilu

Apakah Anda pernah mendengar jika pada pilpres 2019 kemarin terjadi banyak praktek politik uang?		
Pernah Mendengar	118	59,90%
Kurang Mendengar	57	28,93%
Tidak Mendengar	22	11,17%

Berdasarkan data tabel 10, menunjukkan bahwa sebanyak 59,9% responden pernah mendengar jika pada pilpres 2019 kemarin terjadi banyak praktik politik uang. Dari data berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan responden dapat diambil kesimpulan bahwa sebanyak 74,62% responden percaya jika dalam Pemilu terjadi praktik politik uang dan mayoritas responden cenderung lebih banyak pernah

mendengar (59,9%) daripada melihat (20,81%) kejadian praktik politik uang pada Pemilu kemarin.

### **Tanggapan/Sikap Generasi Z Tentang Politik Uang**

Tanggapan atau sikap merupakan perasaan yang memberi pengaruh pada persepsi yang akan disampaikan oleh seseorang. Pada tahap ini responden dimintai tanggapan atau sikap terhadap politik uang. Ada 5 pertanyaan yang diberikan kepada responden yang terdiri dari tanggapan responden jika terjadi praktik politik uang, pandangan responden jika terjadi praktik politik uang, sikap responden jika diminta terlibat dalam praktik politik uang, pendapat responden tentang politik uang dilihat dengan kaca mata nilai-nilai agama, dan pendapat responden ketika politik uang sudah menjadi tradisi atau budaya. Jawaban awaban dari responden tentang tanggapannya terkait politik uang disajikan dalam bentuk table berikut:

Tabel 11 Tanggapan responden tentang terjadinya praktek politik uang

Bagaimana tanggapan Anda jika terjadi praktek politik uang		
Tidak Setuju	150	76,14%
Kurang Setuju	43	21,83%
Setuju	4	2,03%

Berdasarkan tabel 11, menunjukkan bahwa sebanyak 76,14% responden tidak setuju jika terjadi praktik politik uang dalam namun juga masih ada yang setuju yakni sebesar 2,03%.

Tabel 12 Pandangan responden tentang terjadinya praktek politik uang

Bagaimana tanggapan Anda jika terjadi praktek politik uang		
Tindakan buruk/curang/jahat	144	73,10%
Hal itu sudah menjadi tradisi	50	25,38%
Tindakan sah dan wajar saja	3	1,52%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 73,14% responden berpendapat bahwa terjadinya praktik politik uang merupakan Tindakan Buruk/Curang/Jahat.

Tabel 13 Pandangan responden tentang terjadinya praktek politik uang pada Pilpres 2019

Jika ada seseorang dari anggota partai politik atau tim sukses memberikan uang kepada Anda, agar Anda memilih calon tertentu bagaimana sikap Anda?		
Menolak uangnya dan tidak memilih calonnya	144	73,10%
Menerima uangnya tapi tidak memilih calonnya	50	25,38%
Menerima uangnya dan memilih calonnya	3	1,52%

Berdasarkan jawaban dan sikap responden jika ada seseorang dari anggota partai politik atau tim sukses memberikan uang kepada sebanyak 49,75% responden akan Menerima Uangnya Tapi Tidak Memilih Calonnya.

Tabel 14 Jawaban responden tentang politik uang pada Pilpres bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Apakah politik uang dalam pilpres itu bertentangan dengan nilai-nilai agama?		
Bertentangan	163	83,74%
Sedikit bertentangan	25	12,69%
Tidak bertentangan	9	4,57%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 83,74% berpendapat bahwa politik uang bertentangan dengan nilai-nilai agama, 4,57% tidak bertentangan.

Tabel 15 Jawaban responden tentang pendapat jika politik uang sudah menjadi budaya dan tradisi.

Apakah Anda setuju jika ada pendapat bahwa politik uang adalah sudah menjadi bagian tradisi/budaya masyarakat kita, jadi kita tidak perlu menentangnya?		
Setuju	29	14,72%
Kurang Setuju	62	31,47%
Tidak Setuju	106	53,81%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 53,81% responden tidak setuju dan 14,72% setuju.

## Harapan Generasi Z Tentang Politik Uang

Harapan atau evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap sesuatu sebagai aspek yang positif atau negatif. Berikut ini adalah jawaban responden harapan atas terjadinya praktik politik uang pada Pemilu disajikan dalam bentuk tabel 16.

Tabel 16 Jawaban responden tentang harapan atas terjadinya politik uang dalam Pilpres.

Apa harapan Anda atas terjadinya praktek politik uang pada Pemilu 2019		
berharap bisa dihilangkan, karena bertentangan dengan norma yang ada/agama	192	97,46%
berharap politik uang tetap ada, karena itu memabantu ekonomi masyarakat	4	2,03%
berharap supaya masyarakat sadar bahwa suara kita tidak bisa dibayar	1	0,51%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 97,46% responden berharap politik uang bisa dihilangkan, karena bertentangan dengan norma yang ada/agama. Namun masih ada 2,03% yang berharap politik uang tetap ada, karena itu memabantu ekonomi masyarakat. Selanjutnya pertanyaan terbuka terkait apakah politik uang diperlukan dalam pemilu termasuk Pilpres 2019, berikut ini jawaban responden disajikan dalam bentuk tabel 17.

Tabel 17 Jawaban responden tentang apakah politik uang perlu dalam pemilu.

Apakah “politik uang” diperlukan pada pemilu termasuk pada Pemilu 2024?		
Ya	6	3,05%
Tidak	191	96,95%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebanyak 96,95% responden berpendapat bahwa politik uang tidak diperlukan pada pemilu termasuk pada Pilpres 2024.

## Persepsi Generasi Z Tentang Politik Uang

Persepsi Generasi Z dalam penelitian ini menggunakan teori persepsi Brunner. Brunner mengemukakan persepsi merupakan suatu proses kategorisasi yang memiliki kegunaan untuk menarik sebuah kesimpulan atau keputusan. Kategorisasi persepsi dalam penelitian ini didasarkan pada dua bentuk persepsi dari Robbins, yang mengkategorikan penyebab munculnya persepsi menjadi dua yakni persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif muncul disebabkan kepuasan individu terhadap suatu objek yang menjadi sumber persepsinya. Sedangkan persepsi negatif muncul karena individu merasa tidak puas dengan objek yang diamati. Persepsi tentang politik uang ada empat aspek yakni *pengalaman, pemahaman, sikap, dan harapan*.

*Pertama*, pengalaman Generasi muslim Z tentang politik uang, dari 4 item pertanyaan yang ditanyakan pada responden terkait pengalaman tentang politik uang, persentase tertinggi yakni responden pernah melihat sebanyak 60,91% ada tim sukses yang membagi-bagikan kaos, kain, sarung kepada masyarakat di wilayah DIY.

*Kedua*, pemahaman generasi muslim Z tentang politik uang, dapat diambil kesimpulan bahwa sebanyak 74,62% responden percaya jika terjadi praktik politik uang dan mayoritas responden cenderung lebih banyak pernah mendengar (59,9%) dari pada melihat (20,81% ) kejadian praktik politik uang .

*Ketiga*, sikap atau tanggapan generasi muslim z terhadap politik uang sebanyak 76,14% responden tidak setuju jika terjadi praktik politik uang .Tetapi masih ada yang setuju yakni sebesar 2,03%. Sementara itu 73,14% responden berpendapat bahwa politik uang merupakan Tindakan Buruk/Curang/Jahat. Namun sebanyak 49,75% menunjukkan jika ada seseorang dari anggota partai politik atau tim sukses memberikan uang kepada responden, ia akan menerima uangnya tapi tidak memilih calonnya. Disisi lain menunjukkan 82,74% responden berpendapat bahwa politik uang dalam pilpres itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Data lain menunjukkan 53,81% responden tidak setuju bahwa politik uang adalah sudah

menjadi bagian tradisi/budaya masyarakat kita, tetapi masih ada 14,72% yang berpendapat bahwa politik uang adalah sudah menjadi bagian tradisi/budaya masyarakat.

*Keempat*, harapan generasi muslim z terhadap politik uang menunjukkan 97,46% responden berharap politik uang bisa dihilangkan, dan 2,03% berharap politik uang tetap ada, karena itu membantu ekonomi masyarakat. Selain itu survei menunjukkan sebanyak 96,95% responden berpendapat bahwa politik uang tidak diperlukan pada pemilu termasuk Pemilu 2024 yang akan datang

Berdasarkan empat aspek di atas menunjukkan bahwa politik uang adalah hal negatif yang harus dihilangkan karena melanggar nilai-nilai agama dan hukum. Demikian juga pada Pemilu 2024 mendatang. Namun ada hal unik dan menarik, sebanyak 49,75% responden akan menerima uangnya tapi tidak memilih calonnya. Padahal mereka menyatakan bahwa politik uang tidak perlu dan harus dihilangkan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karakteristik pemilih pemula cenderung lebih labil dan apatis dengan literasi tentang politik yang pas-pasan dan cenderung mengikuti teman-teman sejawat.

Sementara itu ditilik dengan kaca mata teori politik uang, kehidupan masyarakat di Indonesia politik uang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kemiskinan, rendahnya pengetahuan terhadap politik uang dan faktor kebudayaan (Rahmanda, 2017). Budaya mungkin menjadi salah satu faktor yang sangat signifikan dalam perilaku responden. Budaya yang dimaksud adalah sifat orang Indonesia yang saling memberi. Tetapi sebanyak 53,81% tidak setuju jika politik uang dikatakan sebagai sebuah budaya atau tradisi.

Dalam budaya politik, dikenal kebudayaan politik partisipan, dimana warga memberikan perhatian besar pada politik dan menganggap partisipasi warga sebagai hal yang diharapkan dan bermanfaat (Nurfaisal, 2018). Kedua, kebudayaan politik subyek dicirikan sikap pasif warga dan menganggap kapasitas mereka sangat terbatas mempengaruhi pemerintahan. Ketiga, kebudayaan politik parokhial, ditandai ketiadaan hasrat warga untuk berpartisipasi dalam politik.

Generasi muslim Z di saat yang sama tidak setuju adanya politik uang, tapi pada saat yang sama mereka juga menerima politik uang walaupun tidak memilih yang memberikan politik uang. Ini karakteristik unik atau labil generasi z, dimana menurut Ervianto (2017) masyarakat berada dalam budaya politik masyarakat yang cenderung mengarah pada interseksi dari ketiga pola budaya politik. Mereka tidak satu warna budaya politik, tapi interseksi dan relasi dinamis yang bisa terus berubah tiap saat.

Walaupun generasi muslim z punya karakter unik atau labil dalam menerima atau menolak politik uang, mereka menyatakan persepsi negatif terhadap politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang menyatakan 97,46% responden berharap politik uang bisa dihilangkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan data hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa: (i) Secara umum responden berpendapat bahwa praktik *politik uang* pada Pemilu adalah tidak terpuji. Terbukti 73,14% responden berpendapat bahwa praktik politik uang merupakan *tindakan buruk/curang/jahat*, dan 82,74% responden berpendapat bahwa politik uang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sebanyak 76,14% responden tidak setuju jika terjadi praktik politik uang, hanya 2,03% menyatakan setuju. (ii) Sebanyak 74,62% percaya jika dalam Pemilu terjadi praktik politik uang. Hal ini terbukti ada 59,9% pernah mendengar dan 20,81% pernah melihat kejadian praktik politik uang pada Pemilu. (iii) Sebanyak 97,46% responden berharap politik uang bisa dihilangkan, karena bertentangan dengan norma yang ada/agama. Namun masih ada 2,03% yang berharap politik uang tetap ada, karena itu membantu ekonomi masyarakat. (iv) Sebanyak 53,81% responden tidak setuju bahwa politik uang sudah menjadi bagian tradisi/budaya masyarakat kita, namun 14,72% yang berpendapat bahwa politik uang sudah menjadi bagian tradisi/budaya masyarakat. (v) Sebanyak 96,95% responden berharap bahwa politik uang tidak diperlukan pada Pemilu termasuk pada Pemilu 2024 yang akan datang. (vi) Hal

yang menarik adalah sebanyak 49,75% menunjukkan bahwa menerima uangnya tapi tidak memilih calonnya.

Oleh karena itu mereka berharap agar tidak ada segala bentuk praktik politik uang dalam Pemilu baik Pileg, Pilkada, ataupun Pilpres, termasuk Pemilu 2014 yang akan berlangsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andayani, Dwi (2018). Ada 5 Juta Pemilih Pemula di Pemilu 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019>, diakses 19 Desember 2022.
- Bayu, Jarot, B. (2019). Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019 Politik Uang Terbanyak. <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a554f644e9/bawaslu-catat-28-pelanggaran-pemilu-2019-politik-uang-terbanyak>, diakses 19 Desember 2022.
- Databoks, (2019). “Jumlah DPT Pemilu 2019 Menurut KPU 2019” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/27/berapa-jumlah-daftar-pemilih-tetap-pemilu-2019>, diakses 19 Desember 2022.
- Erviantono, T. (2017). Budaya politik, uang, dan pilkada. *Jurnal Transformativ*, 3(2), 60-68.
- Goodpaster, Gary. (2001:14) dalam (Ananingsih Sri Wahyu.2016. “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.Pissn:2086-2695.E-Issn: 2527-4716.Jilid 45 No.1.2
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.
- Nail, Muhammad Hoiru. (2019). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245-261.
- Nurfaisal, M. D. *Kebudayaan Politik Dalam Pengaruh Media*.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, Kementerian Kesehatan (2014).

- Rahawarin, Z. A. (2022). Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Pustaka Pelajar. Cirebon.
- Rahmanda, N. S. (2017). Faktor-Faktor Masyarakat Bersikap Dan Berperilaku Permisif Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014.
- Singh, A. P., & Dangmei, J. (2016). Understanding the generation Z: the future workforce. *South-Asian journal of multidisciplinary studies*, 3(3), 1-5.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Surbakti, Ramlan. Partai, Pemilu dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 170.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun.